KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

1MYHAHVQ

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 FINAL/TIDAK FINAL

1721-B1

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK								
		H.1 H.2					Final Tidak Final	
A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG								
A.1 NPWP : 92 978 279 5 741 000								
A.2 NIK : \[\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \								
A.3 Nama : AJI TRI WILDA SAPUTRI								
B. PPh PASAL 21 YANG DIPOTONG								
MASA PAJAK (mm-yyyy) KODE OBJEK PAJAK		JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)		DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TARIF LEBIH TINGGI 20% (TIDAK BER- NPWP)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG/DTP (Rp)	
B.1	3.1 B.2		B.3	B.4	B.5	B.6	B.7	
1	1 21-402-01		4.580.100	4.580.100	0	5	229.005	
Keterangan Kode Objek Pajak : Honor dan Imbalan Lain yang Dibebankan kepada APBN atau APBD yang Diterima oleh PNS, Anggota								
B.8 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen 205								
Nama Dokume			en Faktur Pajak Tanggal 2 5 dd 0 2 mm 2 0 2 2 yyyy					
PPh Pasal 21 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB). Pembebasan ini berdasarkan SKB.								
Nomor: Tanggal dd								
B.10 PPh Pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :								
B.11 PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan :								
C. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK								
C.1 NPWP Instansi Pemerintah :			9 5 3 3 5 0 1 6 2 7 2 2 0 0 0					
C.2 Nama Instansi Pemerintah : RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSAI					AM PROVINSI K	KALIMANTAN	ITIMUR	
C.3 ID Subunit Organisasi :								
C.4 Tanggal :		2 6	dd 0 1 mm	2 0 2 2 yyyy				
^{5.5} Nama Penandatangan : <u>H</u>		HARI	HARI JUMADI					
C.6 Pernyataan Wajib Pajak : Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar di tandatangani secara elektronik.						ı benar dan telah saya		
			dengan ketentuan yang ilk sehingga tidak diperl	j berlaku, Direktorat Jenderal Pajak lukan tanda tangan.	r mengatur bahwa d	dokumen ini tel	ah ditandatangani secara	